



Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara
Sekretariat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Rencana Kerja

Tahun 2022

Rencana Kerja

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2022

Pengarah:

Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.

Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Penanggungjawab:

Ni Nyoman Santi, S.T., M.Sc.

Kepala Bagian Tata Usaha

Penyusun:

Ir. Arbain, M.Si

Ayu Sri Dewi Wahyuni, A.Md

Ni Luh Winda Rini, S.E.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
BALI DAN NUSA TENGGARA

**KEPUTUSAN PIt. KEPALA PUSAT
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA
NOMOR : SK.60/P3E.Bali/TU/SET.1/10/2021**

**TENTANG
RENCANA KERJA
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIt. KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI
DAN NUSA TENGGARA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.905/MENLHK/SETJEN/ SET.1/10/2021 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.82/Setjen/Rocan/ SET.1/10/2021 tentang Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tentang Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.82/SETJEN/ROCAN/SET.1/10/2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2022
- KESATU : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam:
1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022
 2. Pengendalian kegiatan lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022

KETIGA : Surat Keputusan ini belaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 Oktober 2021



Pf. Kepala Pusat,

Nf Nyoman Santi, S.T., M.Sc.
NIP. 19720617 199803 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KLHK (sebagai laporan);
2. Kepala Bidang/Bagian lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan kegiatan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2020 dan sedang melaksanakan kegiatan tahun 2021. Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2020-2024, dan tahun 2022 merupakan tahun ketiga untuk pelaksanaan Rencana Strategi P3E Bali dan Nusa Tenggara.

Rencana Kerja (Renja) P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK tahun 2020 dan 2021 penting untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan komponen kegiatan Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara 2020-2024. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Renja 2021 menjadi evaluasi untuk penyusunan Renja tahun 2022 agar pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dapat terwujud sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana Kerja tahun 2022 disusun sesuai dengan Renstra 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan PermenLHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 yang kami susun, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk bagi kita semua agar kinerja P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan.

Denpasar, November 2021
Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara



Ni Nyoman Santi, ST., M.Sc.
NIP. 19720617 199803 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Struktur Organisasi	4
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021	9
2.1 Capaian Indikator Kinerja 2020.....	9
2.2 Progres Capaian Renstra 2020-2024 Sampai Dengan Tahun 2020	17
2.3 Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2021	18
BAB III RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA KLHK TAHUN 2022.....	21
3.1 Sasaran Kegiatan.....	22
3.2 Komponen Kegiatan.....	23
BAB IV PENUTUP.....	27
BAB V LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Unit Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan di P3E Bali dan Nusa Tenggara	8
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan	10
Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA 2020	10
Tabel 4. Rencana Kerja (Renja) TA. 2020	11
Tabel 5. Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2020-2024 sampai dengan 2020	14
Tabel 6. Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra 2020.....	15
Tabel 7. Realisasi Anggaran per 29 September 2021 per Output	19
Tabel 8. Realisasi dan Progres Output per 29 September 2021.....	20
Tabel 9. Output, sasaran dan Indikator Komponen kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra	24
Tabel 10. Struktur Anggaran berdasarkan belanja Renja TA. 2022.....	26
Tabel 11. Matriks Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2022	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup dan kehutanan merupakan sektor yang penting dalam keberlangsungan kehidupan, namun dalam kerangka pembangunan nasional sektor lingkungan hidup dan kehutanan hanya merupakan sektor penunjang khususnya dalam sektor unggulan pembangunan nasional 2020-2024.

Dalam kebijakan RKP 2022, sektor lingkungan hidup dan kehutanan diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian proiritas nasional yang berujung dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, mendorong pembangunan ekonomi dan memperkecil kesenjangan pembangunan (*gini ratio*). Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka proses perencanaan dimulai dari Pada RPJMN IV tahun 2020 – 2024, tata kelola pemerintahan yang baik telah menjadi salah satu pengarus-utamaan yang diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah: Terwujudnya ASN yang profesional; Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien; Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas yang mulai dielaborasi di dalam RKP setiap tahunnya dan sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 2 Tahun 2017 tentang Rancangan RKP 2021, dengan tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Agar RKP 2021 memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, maka untuk pertama kalinya, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP.

Beberapa isu penting yang diangkat oleh Sekretariat Jenderal KLHK dalam Rancangan Renstra 2020-2024 diantaranya ialah 1) ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral melalui penguatan manajemen ASN

yang profesional berbasis sistem merit. 2) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. 3) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. 4) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian LHK secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Untuk menggambarkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, maka disusunlah dokumen Rencana Kerja ini. Dokumen Renja ini disusun secara partisipatif melibatkan seluruh Satker Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal, dengan menggunakan Aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Penganggaran) maupun melalui serangkaian diskusi dan pertemuan untuk membahas output serta komponen kegiatan di dalamnya.

Dalam Rencana Strategis Setjen KLHK tahun 2020-2024, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK telah diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan "pengendalian pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara" dengan sasarannya "Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara".

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2020-2024, yang telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara berdasarkan PermenLHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka telah disusun rencana kerja tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) tahun 2022. Pada tahun 2022 penyusunan Renja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2020-2024, serta mengacu pada

Renja Setjen KLHK Tahun 2022. Dalam hal penganggaran, penyusunan Renja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2022 didasarkan pada pagu anggaran satker lingkup Setjen Tahun 2021.

Rencana Kerja tahun 2022 diinput dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan Anggaran dan Sistem Informasi Kinerja) dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2022 yang merupakan sistem terpadu antara aplikasi Renja, aplikasi ADIK dan RKA K/L serta aplikasi kinerja yang sebelumnya terpisah. Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK Tahun 2020-2024 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Setjen KLHK Tahun 2020-2024.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dibentuklah Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion di enam (6) wilayah Indonesia, dan salah satunya di Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara, yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan Pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut:

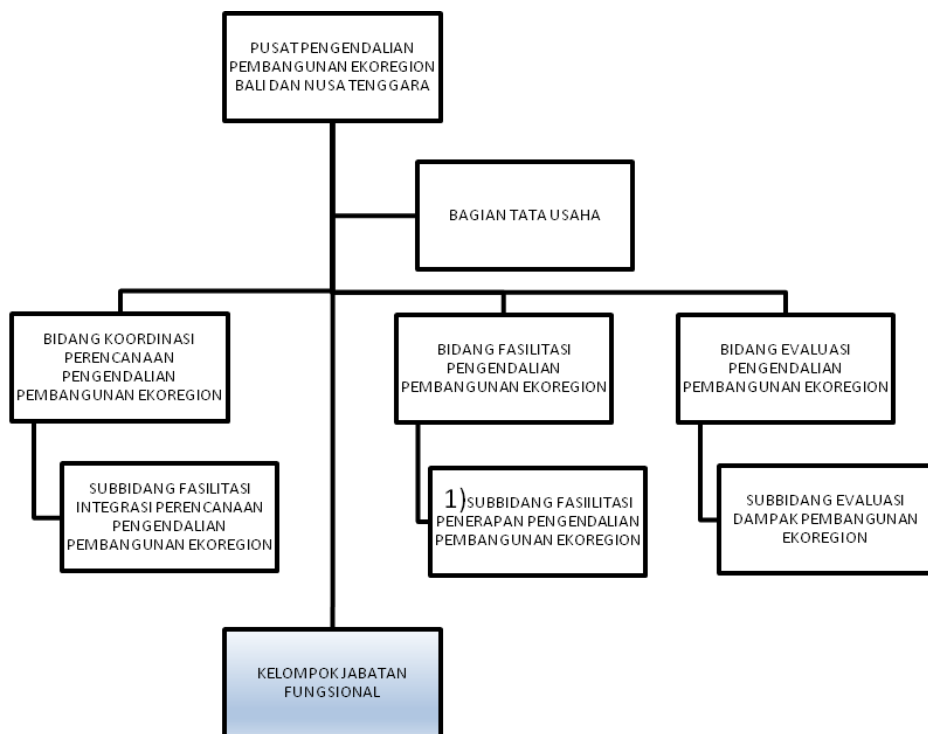
1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
2. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
3. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

4. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas 4 (empat) bagian/bidang yaitu; (1) Bagian Tata Usaha; (2) Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion; (3) Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion; (4) Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar struktur organisasi di bawah ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Adapun struktur organisasi Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara terdiri dari 4 (empat) bagian/bidang dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi. Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - b. pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - c. pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - d. analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - e. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
 - f. pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;dan

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan fasilitas penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
 - b. pelaksanaan fasilitas penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
 - c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitas penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitas Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan

pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

b. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

c. pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

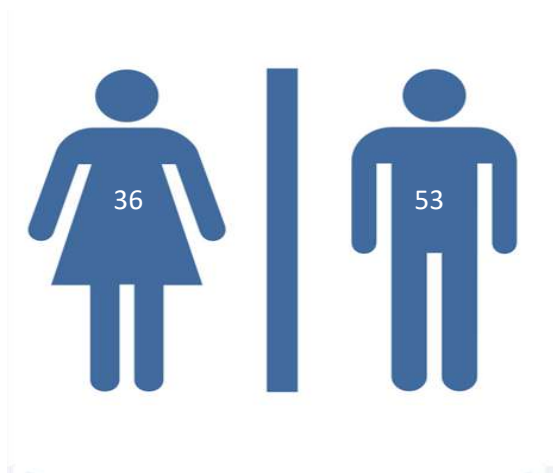
a. Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pelaksanaan unit kegiatan di lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan diberikan penanggungjawab kepada bagian/bidang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Unit Kegiatan dan Penanggung Jawab Kegiatan di P3E Bali dan Nusra

No.	Unit Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion
2.	Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion
3.	Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion
4.	Penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan BMN	Bagian Tata Usaha



Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3EBN) KLHK pada tahun 2022, maka didukung Sumber Daya manusia (SDM) sebanyak 89 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 32 laki-laki dan 23 perempuan serta 23 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNPPN) yang terdiri dari 23 laki-laki dan 11 orang perempuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara (P3EBN) KLHK akan memperhatikan komposisi SDM yang responsif gender.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN PROGNOSIS TAHUN 2021

2.1 Capaian Indikator Kinerja 2020

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 dan telah disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Jenderal-KLHK tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2020 yang merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara tahun 2020-2024, diharapkan tugas pokok dan fungsi dapat dilakukan secara terarah dan terkendali dalam mengakomodasi permasalahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

Untuk mencapai kebijakan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah ditetapkan, maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh tingkat eselon 1 dilingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran dan indikator kinerja program Sekretariat Jenderal (setjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion untuk tahun 2020-2024.

Strategi yang akan digunakan agar arah kebijakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020-2024 menjadi tepat sasaran dijabarkan dalam Rencana strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara 2020-2024, untuk mengacu kepada Sasaran dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Renstra eselon 2 satker mandiri hanya menyusun "sasaran dan indikator kinerja kegiatan, serta sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan".

Adapun sasaran dan indikator kinerja kegiatan serta sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara – KLHK sebagai berikut :

2.1.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran kegiatan ditetapkan untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan. Sasaran kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran dan indikator kinerja kegiatan, sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan serta capaian target 2020 dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan/ Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pengendalian Pembangunan LHK Regional						
Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali dan Nusra	a. Inventarisasi dan Perhitungan DDDTLH di Wilayah Ekoregion Bali dan Nus Tenggara	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	b. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Wilayah Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
	c. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	d. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	4 Poin	4 Poin	4 Poin	4 Poin	4 Poin

Sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, P3E Bali Nusra telah mencapai capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020-2024. Capaian yang diperoleh P3E Bali Nusra pada Tahun 2020, sebagaimana pada tabel 3.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion	1. Hasil Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	2. Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	4. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4 Poin	3,81 Poin	95,25%

Tabel 4. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020

Kegiatan/Output Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sasaran Kompoen Kegiatan	Indikator Kegiatan/Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)
Pengendalian Pembangunan LHK Ekoregion Bali & Nusra	Terkendalinya Pembangunan LHK di Ekoregion Bali & Nusra	a. Hasil inventarisasi dan perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion	Dokumen	1	12.417.308.000,-
		b. Rencana pengelolaan SDALH di Wilayah Ekoregion	Dokumen	1	
		c. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemangunan LHK dan Penerapan Program Strategis	Dokumen	1	
		d. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	Point	4	
		e. Jumlah dokumen/laporan Layanan Dukungan Manajemen Satker	Dokumen / Laporan	10	
		f. Jumlah unit layanan Sarana dan Prasaranan Internal	Unit	23	
		g. Jumlah Layanan Perkantoran	layanan	12	
<i>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</i>					208.902.000,-
1. Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion BaliNusra	Terinventarisasi dan terhitungnya Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di wilayah ekoregion BaliNusra	a. Jumlah dokumen Inventarisasi dan Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di ekoregion Balinusra	Dokumen	1	199.875.000,-
2. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Terfasilitasinya pemerintah daerah dalam penyusunan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	b. Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun perencanaan pembangunan berbasisi DDDT	Daerah	3	9.207.000,-
3. Penyusunan rencana pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Ekoregion Bali	Tersusunya rencana pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah rencana pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di ekoregion Bali Nusra	Dokumen	1	178.096.000,-

Kegiatan/Output Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sasaran Kompoen Kegiatan	Indikator Kegiatan/Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)
dan Nusra					
4. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun perencanaan pembangunan (RPPLH dan KLHS) berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Daerah	3	0
5. Evaluasi Pengelolaan SDALH	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data informasi bahan evaluasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Data dan informasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Dokumen	1	45.087.000,-
6. Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas Ekoregion BaliNusra	Jumlah lokasi yang dipantau	Lokasi	6	67.231.000,-
7. Tindak lanjut hasil evaluasi	Terlaksannnya tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH di ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah hasil evaluasi yang ditindak lanjuti dalam pengelolaan SDALH	Dokumen	1	124.381.000,-
8. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	Terlaksananya survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	Adanya data hasil survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	Poin	4	-
<i>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</i>	Terlaksananya layanan dukungan manajemen di P3E Bali dan Nusa Tenggara	a. Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Program dan Penusunan Rencana Anggaran	Dokumen	7	879.937.000,-
		b. Jumlah laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	1	
		c. Jumlah laporan Pengelolaan Keuangan	Laporan	1	
		d. Jumlah laporan Pengelolaan Kepegawaian	Laporan	1	
		e. Jumlah laporan Pelayanan Umum dan Perlengkapan	laporan	1	
1. Penyusunan Rencana Program dan Penusunan Rencana	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan	a. Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusa Tenggara 2020-2024	Dokumen	1	217.264.000,-
		b. Jmlah Dokumen RENJA	Dokumen	1	
		c. Jmlah Dokumen TOR dan	Dokumen	1	

Kegiatan/Output Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sasaran Kompoen Kegiatan	Indikator Kegiatan/Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)
Anggaran	Nusra	RKAKL			
		d. Jmlah Dokumen ADIK	Dokumen	1	
		e. Jmlah Laporan LKj	Laporan	1	
		f. Jumlah Laporan P39 Bapenas	Laporan	1	
		g. Jumlah Laporan RKA	Laporan	1	
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Laporan	1	32.408.000,-
3. Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis	Jumlah laporan keuangan	Laporan	1	56.740.000,-
4. Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E baliNusra	Jumlah laporan kepegawaian	laporan	1	257.419.000,-
5. Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum dan perlengkapan	Jumlah laporan BMN	Laporan	1	316.106.000,-
		Jumlah laporan kehumasan	Laporan	1	
<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	Terlaksananya pengadaan SARPRAS internal di P3E BaliNusra	a. Pengadaan Kendaraan Bermotor	Unit	3	621.083.000,-
		b. Pengandaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	21	
1. Pengadaan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor	Jumlah unit kendaraan bermotor	Unit	3	64.515.000,-
2. Pengandaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkaontoran	Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran	Unit	21	556.568.000,-
<i>Layanan Perkantoran</i>	Terlaksananya operasional perkantoran yang efektif dan efisien	a. Jumlah ASN yang terbayar gaji dan tunjangan	Bulan	12	10.292.591.000,-
		b. Jumlah SARPRAS dalam pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	
1. Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E BaliNusra	Bulan	12	6.189.351.000,-
2. Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	a. Terlaksananya operasional perkantoran (pemayaran PDAM, Tlp, Listrik, ATK dan lainnya).	Bulan	12	4.103.240.000,-

Kegiatan/Output Kegiatan/ Komponen Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sasaran Kompoen Kegiatan	Indikator Kegiatan/Indikator Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi Anggaran (Rp)
		b. Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)	Bulan	12	

Sesuai dengan Renja 2020 yang telah dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan progres capaian Renstra 2020-2024 sampai dengan 2020, pada Kegiatan Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, sebagaimana pada tabel 5.

Tabel 5. Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan dan Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2020-2024 sampai dengan 2020.

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	satuan	Kinerja 2020			Kinerja 2020-2024		
				T	R	(%)	T	R	%
Pengendalian Pembangunan LHK Regional	Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion	1. Hasil Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion	Dokumen	1	1	100	8	1	12,50
		2. Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion	Dokumen	1	1	100	8	1	12,50
		3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK	Dokumen	1	1	100	5	1	20
		4. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	Poin	4	3,81	95,25	4	3.81	95,25
		Rerata Realisasi Capaian			98,81			35,06	

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Komponen Kegiatan

Sesuai dengan Renja 2020 yang telah dituangkan dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka capaian indikator kinerja komponen kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagaimana disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusra 2020.

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah						
1	Pelaksanaan Inventarisasi SDALH dan Perhitungan DDDT di Wilayah Ekoregion BaliNusra	Terinventarisasi dan terhitungnya Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di wilayah ekoregion BaliNusra	Jumlah dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung SDALH di ekoregion Balinusra	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyusunan inventarisasi dan perhitungan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Terfasilitasinya pemerintah daerah dalam penyusunan DDDT SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun DDDT SDALH	3 Pemda	3 Pemda	100%
3	Penyusunan rencana pengelolaan SDALH diEkoregion BaliNusra	Tersusunnya rencana pengelolaan SDALH di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah rencana pengelolaan SDALH di ekoregion BaliNusra	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Pemerintah Daerah yang menyusun perencanaan pembangunan (RPPLH dan KLHS) berdasarkan DDDT di Ekoregion Bali dan Nusra	3 Pemda	0 Pemda	0%
5	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Terlaksananya pengumpulan dan analisis data informasi bahan evaluasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	Data dan informasi pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Pemantauan kualitas lingkungan	Terlaksananya pemantauan kualitas Ekoregion BaliNusra	Jumlah lokasi yang dipantau	6 Lokasi	6 Lokasi	100%
7	Tindak lanjut hasil evaluasi	Terlaksannanya tindak lanjut pengelolaan SDA dan LH di ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah hasil evaluasi yang ditindak lanjuti dalam pengelolaan SDALH	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

8	Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3e Bal & Nusra	Terlaksananya survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	Adanya data hasil survei tingkat kepuasan layanan terhadap kegiatan P3E BaliNusra	4 Poin	3,81 Poin	95,25%
Layanan Dukungan Manajemen Satker						
1	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusra 2020-2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen RENJA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Dokumen KRISNA	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Laporan LKj	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Jumlah Laporan Triwulan P39 Bapenas	4 Laporan	4 Laporan	100%
			Jumlah Laporan Bulanan RKA	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Jumlah Laporan RKA	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, dan DAK LHK	2 Laporan	0 Laporan	0%
3	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien	Jumlah laporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100%
4	Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E BaliNusra	Jumlah laporan kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Jumlah laporan kehumasan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Layanan Sarana Internal						

1	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor	Jumlah unit kendaraan bermotor	3 Unit	3 Unit	100%
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Jumlah unit peralatan dan fasilitas perkantoran	21 Unit	21 Unit	100%
Layanan Perkantoran						
1	Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terlaksana kelancaran pembayaran gaji dan tunjang	Terbayarnya gaji dan tunjangan	12 Layanan	12 Layanan	100%
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (PDAM, Tlp, Listrik, ATK dan lainnya).	12 Layanan	12 Layanan	100%
			Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)	12 Layanan	12 Layanan	100%

2.2 Progres Capaian Renstra 2020-2024 sampai dengan Tahun 2020

Secara umum hasil capaian kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan Progres Renstra 2020-2024, sebagian besar telah memenuhi target, rata-rata capaian progres Renstra 2020-2024 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

1. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2020-2024 sampai dengan 2020 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebesar 34,37%. Peresentase ini merupakan hasil akumulasi dari target IKK tahun 2020-2024. Jika mengacu pada target IKK tahun 2020 pada Renstra 2020-2024 maka Pencapaian kinerja P3E Bali Nusra adalah 98,81%.
2. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2020-2024 sampai dengan 2020 pada IKK 1: Hasil Inventarisasi dan Perhitungan DDDT LH di Wilayah Ekoregion adalah 12,50%

3. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2020-2024 sampai dengan 2020 pada IKK 2: Rencana Pengelolaan SDA LH di Wilayah Ekoregion adalah 12,50%
4. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2020-2024 sampai dengan 2020 pada IKK 3: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan LHK dan Penerapan Program Strategis LHK adalah 20%
5. Progres Pencapaian Kinerja Renstra 2020-2024 sampai dengan 2020 pada IKK 4: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E adalah 95.25%. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa responden merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh P3E Bali & Nusa Tenggara dengan beberapa masukan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan di masa yang akan datang.
6. Secara Keseluruhan capaian kinerja P3E Bali & Nusra tahun 2020 sebesar 92,12% dengan anggaran sebesar 98,80% atau rasio sebesar 107%. Tingkatan rasio lebih dari 1 (satu) ini terjadi karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena adanya refocusing dan realokasi belanja tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

2.3 Prognosis Capaian Kinerja 2021

Berdasarkan pemantuan Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan per tanggal 29 September 2021, bahwa serapan anggaran P3E Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi per output, maka realisasi anggaran yang tertinggi terdapat pada output "Layanan Perkantoran" dengan realisasinya sebesar 71,71% dan realisasi anggaran terendah terdapat pada output "Layanan Umum" sebesar 39,5 %. Hal ini disebabkan karena adanya rencana kegiatan yang sedang dilakukan pelaksanaannya, sehingga total realisasi anggaran per 29 September 2021 sebesar 66,18 %, seperti disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Realisasi anggaran per 29 September 2021 per output.

No	Nama Output	Anggaran		Persen (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Base Line)	2.005.311.000	945.314.139	47,14
2.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	914.795.000	362.078.300	39,58
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.199.740.000	847.199.000	70,62
4.	Layanan Perkantoran	10.342.182.000	7.416.826784	71,71
Total		14.462.028.000	9.571.418.223	66,18

Untuk realisasi output (fisik) kegiatan tidak diisi tiap bulan untuk output "Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Base Line)" dengan target kumulatif 3 dokumen untuk tahun 2021, maka karena adanya penghematan/*refocusing* anggaran 2021 untuk percepatan penanganan pencegahan dan penanggulangan COVID 19 sehingga target capaian output diturunkan menjadi 3 Dokumen untuk tahun anggaran 2021, sedangkan realisasi fisik kegiatan tiap bulan tidak diisi karena akan diisi pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui capaian kinerja pada Rencana Kerja Tahunan. Untuk realisasi fisik kegiatan per 29 September tahun 2021 rata – rata progresnya sebesar 71,25%

Berdasarkan aplikasi SAS dan SMART Kementerian Keuangan bahwa realisasi fisik progres tertinggi terdapat pada output "Layanan Perkantoran" sebesar 85% dan realisasi anggaran terendah terdapat pada output "Layanan Dukungan Manajemen eselon 1/Satker" sebesar 50%, pada tabel 8.

Tabel 8. Realisasi dan progres Output per 29 September 2021

No	Nama Output	Output			Ket
		Target	Realisasi	Progres	
1.	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	-	70%	
2.	Layanan Dukungan Manajemen eselon 1/Satker	1 Layanan	-	50 %	
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Bulan	-	80 %	
4.	Layanan Perkantoran	1 Layanan		85%	
Rata-rata progres		-	-	71,25%	

BAB III

RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI DAN NUSA TENGGARA KLHK TAHUN 2022

Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 diinput pada aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/lembaga yang dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Aplikasi KRISNA digunakan dalam proses penyusunan Renja K/L tahun 2022 yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi penyusunan RKA K/L TA. 2022. Aplikasi KRISNA mempunyai fungsi sebagai alat bantu bagi K/L dalam proses penyusunan (*input* dan *update*) Renja K/L. Pengisian aplikasi KRISNA dilakukan sampai level Program, sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rinsian Ouput (RO) meliputi target, volume, satuan dan lokasi pelaksanaannya baik untuk output prioritas nasional maupun output non prioritas. Khusus untuk output prioritas nasional, apabila ada perubahan di luar kesepakatan *trilateral meeting* maka dibutuhkan persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkeu selama tidak mengurangi target yang disepakati, apabila ada pengurangan target PN maka harus mendapatkan persetujuan Presiden. Dengan adanya aplikasi KRISNA ini diharapkan proses perencanaan akan lebih terintegrasi, efektif dan terukur pencapaiannya di lapangan sehingga memberikan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas.

Dalam konteks RKP 2022 bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka untuk menjamin tercapainya Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, telah disusun 19 kegiatan beserta sasaran dan indikatornya di dalam Renstra KLHK 2020-2024, salah satunya yaitu kegiatan “Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara” dengan sasarannya

“Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

3.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pengendalian ekoregion Bali dan Nusa Tenggara adalah Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu: (1) Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, (2) Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion, (3) Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion, (4) Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E.

Berdasarkan pandangan dan harapan berbagai pihak serta permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan selama ini di wilayah kerja ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, maka Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara telah diarahkan untuk melaksanakan capaian sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kebidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan telah jabarkan Program Sekretaris Jenderal yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran programnya “meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” dan selanjutnya jabarkan dalam sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali dan Nusa Tenggara yaitu Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dengan indikatornya: (1) Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, (2) Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion, (3) Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion, (4) Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
2. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
3. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
4. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta arahan program dan sasaran kinerja program Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara yaitu meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

3.2 Komponen Kegiatan

Sasaran dan indikator kinerja komponen kegiatan yang ditetapkan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, dimaksudkan untuk pengukuran ketercapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Sasaran komponen kegiatan menggambarkan kondisi yang harus dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 di wilayah ekoregion Bali dan Nusa Tenggara.

Untuk menjamin tercapainya Sasaran Kegiatan, maka telah disusun output komponen kegiatan, sasaran dan indikator komponen kegiatan, sebagaimana pada tabel 9.

Tabel 9. Output, sasaran dan Indikator Komponen Kegiatan Pusat Pengendalian Ekoregion Bali Nusra

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
1.	Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan
	Pelaksanaan Pembinaan dan Penerapan pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	Terlaksananya pembinaan dan penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, dan limbah berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion	Jumlah pemerintah daerah yang dibina dan difasilitasi dalam penerapan pengendalian pembangunan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 di wilayah ekoregion
3.	Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Terlaksananya evaluasi pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion	Jumlah Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi dampak pembangunan LHK di wilayah ekoregion
4.	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E BaliNusa	Terlaksananya survei tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E BaliNusra	Peningkatan kepuasan publik terhadap layanan P3E Bali dan Nusa Tenggara
Layanan Dukungan Manajemen Satker			
1.	Penyusunan Rencana Program dan Penusunan Rencana Anggaran	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi program dan anggaran di Ekoregion Bali dan Nusra	Jumlah Dokumen RENSTRA P3E Bali & Nusa Tenggara 2020-2024
			Jumlah Dokumen RENJA
			Jumlah Dokumen TOR dan RKAKL
			Jumlah Dokumen KRISNA
			Jumlah Laporan LKj
			Jumlah Laporan Triwulan P39 Bapenas
			Jumlah Laporan Bulanan RKA

No	Output dan Komponen Kegiatan	Sasaran Komponen Kegiatan	Indikator Komponen Kegiatan
2.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan DBH DR, DAK dan kegiatan lainnya
3.	Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan ekonomis	Jumlah laporan keuangan
4.	Pengelolaan Kepegawaian	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kepegawaian dilingkup P3E BaliNusra	Jumlah laporan kepegawaian
5.	Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Terlaksananya penataan layanan umum & perlengkapan	Jumlah laporan BMN
			Jumlah laporan kehumasan
			Jumlah Laporan Diseminasi
6.	Pengarusutamaan Gender	Terlaksananya Pengarusutamaan gender dilingkup P3E Bali Nusra	Jumlah Laporan PUG
Layanan Sarana Internal			
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit Peralatan dan mesin
Layanan Perkantoran			
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	Terlaksananya kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN lingkup P3E BaliNusra
3.	Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Meningkatnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Terlaksananya operasional perkantoran (pelayanan PDAM, Tlp, Listrik, ATK dan lainnya).
			Terlaksananya pemeliharaan perkantoran (komputer, AC, taman, kendaraan, dan lainnya)

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja unit kegiatan tersebut, maka berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-533/MK.02/2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 serta memperhatikan arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022, bahwa pagu anggaran Satuan Kerja Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara KLHK sebesar **Rp 14.500.277.000,-** dengan rincian pada tabel 10.

Tabel 10. Struktur Anggaran Berdasarkan Belanja Renja TA. 2022

No	URAIAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	KET.
1.	Belanja Pegawai	7.039.407.000	
2.	Belanja Operasional	3.738.110.000	
3.	Belanja Non Operasional	3.772.760.000	
Total		14.500.277.000	

Di tahun 2022, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara memiliki peranan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam konteks pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion, tidak hanya sebagai koordinator tetapi sebagai eksekutor yang mampu memberikan koreksi terhadap kebijakan pembangunan di daerah berkerja sama dengan UPT dan Pemda serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam pengendalian pembangunan di wilayah kerjanya sehingga dapat meminimalkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Di samping itu, P3E merupakan perwakilan Setjen di daerah yang harus mampu mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah baik yang dilaksanakan oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKPD maupun oleh instansi terkait lain dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan sampai ke tingkat tapak di KPH, DAS, Taman Nasional, dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian P3E menjamin bahwa kebijakan Menteri dan Eselon I berjalan dengan baik di daerah. Untuk meningkatkan peran P3E di dalam pembangunan LHK, diharapkan dapat melakukan pemetaan peran, tugas dan fungsi P3E dari hulu sampai hilir terkait dengan pembangunan LHK, dengan memperhatikan respon gender melalui aspek kesetaraan dan keadilan gender dalam mewujudkan Pengharusutamaan Gender (PUG) dengan melibatkan perempuan dan laki-laki secara proporsional dan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pada tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2022 merupakan tahun ketiga diterapkan integrasi Rencana Kerja (Renja) dan Informasi Kinerja Anggaran yang dituangkan dalam aplikasi KRISNA dengan RKAKL. Nomenklatur, volume, satuan output/komponen, lokus dan besaran anggaran di dalam aplikasi KRISNA merupakan referensi di dalam penyusunan dokumen RKAK/L yang otomatis bisa ditransformasikan, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya sama.

Disusunnya Rencana Kerja 2022, melalui pendekatan-pendekatan di atas, dan untuk memastikan pencapaian target dan sasaran yang termuat dalam Renstra P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK 2020-2024 yang telah disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi P3E Bali Nusra berdasarkan PermenLHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka P3E Bali dan Nusa Tenggara KLHK akan berupaya melakukan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan melalui dukungan alokasi anggaran, regulasi dan sumber daya manusia dengan memperhatikan respon gender melalui aspek kesetaraan dan keadilan gender dalam mewujudkan Pengharusutamaam Gender (PUG), sehingga dapat meningkatkan dan mensukseskan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan Prognosis Capaian Kinerja 2021 merupakan salah satu modal utama untuk pelaksanaan rencana kerja tahun 2022, sehingga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan yang lebih dan mencapai target yang ditetapkan serta berdampak positif bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk memastikan upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Bali dan Nusa Tenggara, sesuai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Provinsi Bali, NTB dan NTT dengan menentukan jumlah yang proporsional antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan kegiatan dan memperhatikan responsif gender peserta yang dituju dalam kegiatan.

BAB V

LAMPIRAN

Matriks Rencana Kerja Pusat Pengendalian Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara dan Anggarannya pada masing-masing unit kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Tabel 11. Matriks Rencana Kerja (Renja) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2022

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Komponen Kegiatan	Satuan	Target	Alokasi Anggaran
Kegiatan: Pengendalian pembangunan LHK Regional				14.500.277.000,-
	Sasaran Kegiatan: Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali dan Nusra			
	1. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion,	Pemda	8	
	2. Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion,	Pemda	8	
	3. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,	Pemda	8	
	4. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	Poin	4	
	Output 1: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pemda	24	2.445.893.000,-
	5. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion,	Pemda	8	825.000.000,-
	6. Layanan Pembinaan dan Penerapan pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion,	Pemda	8	795.893.000,-
	7. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,	Pemda	8	825.000.000,-
	8. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan P3E BaliNusa	Poin	4	53.400.000,-
	Output 2: Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	1.194.360.000,-
	1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Dokumen/laporan	9	244.893.000,-
	2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen/laporan	2	63.244.000,-
	3. Pengelolaan Keuangan	Dokumen/laporan	2	249.300.000,-
	4. Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen/laporan	12	445.500.000,-
	5. Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Dokumen/laporan	3	178.423.000,-
	6. Pengarusutamaan Gender	Dokumen/laporan	1	13.000.000,-
	Output 3: Layanan Sarana Internal	Unit	5	29.107.000,-
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	5	29.107.000,-
	Output 4: Layanan Perkantoran	Layanan	2	10.777.517.000,-
	1. Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	7.039.407.000,-
	2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Layanan	1	3.738.110.000,-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NI NYOMAN SANTI, ST, M.Sc
Jabatan : Plt. KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI -
NUSA TENGGARA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar-benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Desember 2021

Pihak Pertama,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001

NI NYOMAN SANTI, ST, M.Sc
NIP. 19720617 199803 2 001

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION BALI NUSA TENGGARA

Kegiatan (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kegiatan (3)	Target (4)	Satuan (5)
5374. Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01-Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali – Nusa Tenggara	01-Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion 02-Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion 03-Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion 04-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	8 8 8 4	Daerah Daerah Daerah Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Layanan Umum P3E Bali Nusra 001-Layanan Perkantoran P3E Bali Nusra	1 2	Layanan Layanan	1.247.760 10.777.517
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Interna	001- Layanan Sarana Internal P3E Bali-Nusra	5	Unit	29.107
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001- Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra	24	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	2.445.893

Sekretaris Jenderal

Jakarta, Desember 2021

Plt. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara

Dr.Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001

NI NYOMAN SANTI, ST, M.Sc
NIP. 19720617 199803 2 001